

**STUDI KOMPARATIF TAHAPAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN PERDESAAN  
DI INDONESIA DAN MALAYSIA  
(Studi Kasus: Desa Alamendah, Kabupaten Bandung-Indonesia  
dan Desa Peruas, Pahang-Malaysia)**

Oleh :

<sup>1</sup>AHLUNNAZA PANDU RAHARJO DAN <sup>2</sup>NIA KURNIASARI,ST., MT.

Program Studi Perencanaan Wilayah  
dan Kota, Fakultas Teknik,  
Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung, 40116

**ABSTRACT**

*The growth of urban areas very rapidly raises significant issues that take effect in the development of rural areas. The strategic issues of rural development in Indonesia and Malaysia are poverty, unemployment, and economic vulnerability of rural communities; limited availability of public services and the minimum basic service, low empowerment of rural communities, not optimal village governance and institutional role of the village in the planning and development of the village, not optimal spatial arrangement of rural areas, natural resource management and environmental environment, the limited availability of infrastructure in the open isolation of rural areas and encourage linkages Rural- Urban.*

*This study is intended to determine how the rural development planning process in Indonesia dan Malaysia. This study used qualitative research methods with a qualitative descriptive design format to describe the condition of the various phenomena that exist in the community that the object of research, and pull it to the surface of reality as a feature, character, nature, model or description of the condition or phenomenon particular. Data was collected through structured and in-depth interviews, and studies in the literature that focused on the exploration of related literature. Data analysis is done by using the method of triangulation and interpretative. Triangulation method rests on the validity of the findings and the level of confidence. Data analysis is inductive, meaning is the result of research rather than generalizations.*

*Stages of Rural Development Planning in Indonesia and Malaysia are basically not much different, the two countries each have the characteristics and traits of its own in the formulation of rural development planning in the country. Based on the Minister Regulation Number 114 of 2014 on Guidelines for Rural Development, Indonesia defines the planning of rural development in the form of Mid Term Development Plan Rural (Rural Development Plan). Malaysia defines the rural development plan according to Act 172 About Design City and Village act 1976 in the form Slowly Rural (PTD). The results of this research can be used as a model for the analysis of policy makers both at the central and regional governments.*

*Keywords: Planning Process, Rural Planning, Policy Of Rural Development Planning*

## **Pendahuluan**

Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yang pertama yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di perdesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (hardware berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan software berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya disebut Pembangunan Desa.

Malaysia pada tahap awal setelah kemerdekaan, terlihat beberapa masalah umum perekonomian yang dihadapi oleh perdesaan Malaysia, seperti angka kemiskinan, kurangnya akses ke infrastruktur dasar, kesehatan yang buruk dan pendidikan. Di balik kejadian ini, ada variasi kondisi pedesaan seperti sumber daya, sosial budaya, politik dan ekologi memiliki pengaturan fisik yang berbeda masing-masingnya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pedesaan sering diabaikan karena banyaknya keragaman konteks pedesaan.

Sedangkan untuk isu pembangunan pedesaan dan tantangan Malaysia (Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) diantaranya: 1) Mencapai keseimbangan optimal antara pembangunan perkotaan dan pedesaan; 2) Memastikan pertanian tetap kompetitif dalam menghadapi globalisasi dan liberalisasi; 3) Memastikan ekonomi terus berkembang dan menjaga stabilitas harga; 4) Mengurangi keberlanjutan kemiskinan dan akar penyebab kemiskinan; 5) Mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kemiskinan relatif; 6) Perubahan pola pikir rakyat pedesaan; 7) Berkurangnya nilai pedesaan; 8) Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah; 9) Kesempatan kerja

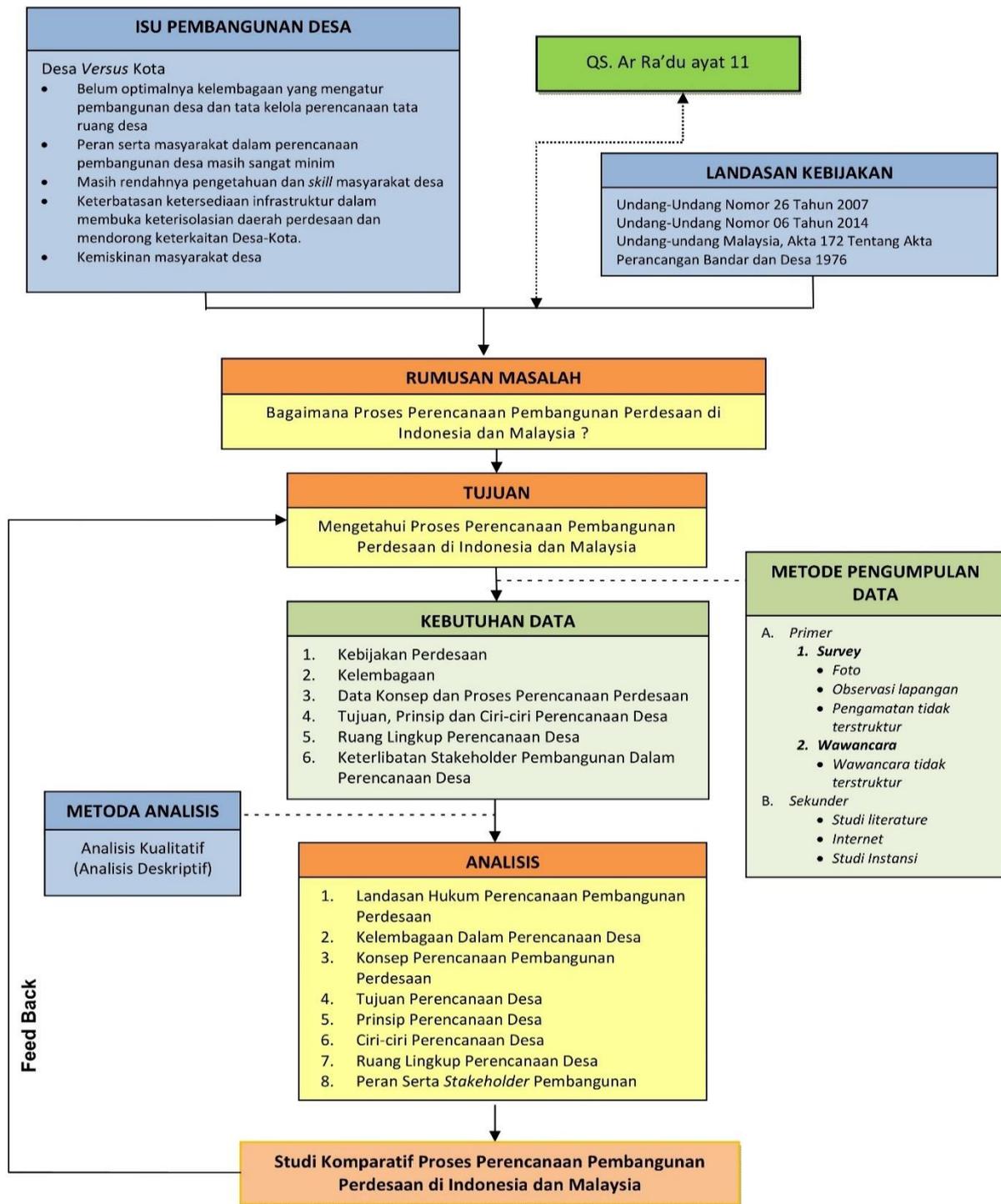
yang tidak menarik Terbatasnya; 10) peluang dalam bidang wirausaha Kurangnya prospek; 11) Rendahnya nilai tambah suatu produk; 12) Ketergantungan pada tenaga kerja asing; 13) Rendahnya produktivitas; 14) Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan

Kondisi saat itu memaksa harus menyikapi pembangunan daerah pedesaan yang berkaitan dengan kondisi awal di bawah-pengembangan sektor tradisional khususnya sektor pertanian yang pada dasarnya diabaikan selama pemerintahan kolonial. Selain itu, agenda untuk pengembangan budaya Melayu yang sebagian besar tinggal di daerah pedesaan, ditafsirkan sebagai bagian dari tawar-menawar dan kompromi yang disepakati antara Melayu dan non-Melayu sebelum kemerdekaan, yaitu perlindungan "Hak Istimewa Orang Melayu"

Sehingga untuk menjawab isu permasalahan pengembangan kawasan pedesaan tersebut, diamanatkan dalam Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan pula tentang arahan bagi penataan ruang kawasan pedesaan, yaitu: 1) pemberdayaan masyarakat pedesaan; 2) pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya; 3) konservasi sumber daya alam; 4) pelestarian warisan budaya lokal; 5) pertahanan kawasan lahan abadi; 6) pertanian pangan untuk ketahanan pangan; 7) penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan-perkotaan

Dari permasalahan dan isu seperti tersebut diatas antara di Malaysia dan Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian penelitian terhadap proses perencanaan pembangunan di tingkat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan suatu desa yang nantinya akan berdampak juga pada peningkatan kesejahteraan yang merata di suatu Kabupaten/Kota, Provinsi dan bahkan Nasional.

## **Metodologi**



Gambar 1 Kerangka Berfikir

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (qualitative research), yaitu penelitian yang hasil temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, melainkan melalui pengungkapan dan

pemahaman terhadap sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum diketahui (Strauss dan Corbin,2003). Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, adapun langkah- langkah yang

dilakukan antara lain yaitu : 1) Studi Literatur; 2) Pengumpulan Data Sekunder; 3) Pengumpulan Data Primer; 4) Observasi; 5) Wawancara; 6) menelusuri dokumen-dokumen; 7) Manajemen Data

### **Prosedur Analisis**

Menganalisa berbagai data dan informasi yang telah diperoleh, digunakan metode analisa kualitatif. Secara kualitatif analisa akan lebih banyak didasarkan pada model *descriptive analysis*.

Analisa dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung, dimana setiap informasi dan data yang ditemukan di-cross check dengan komentar responden yang berbeda untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih akurat dan objektif. Selanjutnya data dikategorisasi ke dalam penyelenggara pemerintahan desa, perencanaan perdesaan, dan kebijakan-kebijakan pembangunan perdesaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai model Milles dan Huberman, menjelaskan bahwa analisa data kualitatif bisa dilakukan melalui tiga proses tahapan, yaitu data reduction, data display, dan *conclusion drawing/verification*.

Pertama, *data reduction*, merupakan suatu proses seleksi, memfokuskan, menyederhanakan dan mentransformasikan data-data yang dianggap penting berdasarkan kebutuhan kajian penelitian. Hal ini dilakukan, karena dalam penelitian kualitatif pada umumnya peneliti mengumpulkan data sebanyak mungkin. Oleh karena itu, mereduksi data amat penting dilakukan dengan menggunakan beragam alat catatan, note book, dan komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu yang relevan dengan fokus kajian penelitian ini.

Kedua, *data display* (penyajian data) merupakan deskripsi kumpulan informasi tersusun sehingga memungkinkan peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang lazim digunakan adalah dalam bentuk teks naratif, yang terpenting dalam data display adalah dalam penyajian data penelitian

kualitatif, peneliti memanfaatkan teks yang bersifat naratif.

Ketiga, *conclusion drawing/verification*, menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti masih bersifat sementara, dan akan berubah, jika peneliti menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data (*data collecting*) berikutnya. Namun demikian, jika kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lagi, maka kesimpulan yang dihasilkan bias dikatakan kredibel. Proses ini merupakan prosedur peneliti untuk melakukan verifikasi data

**Pembahasan**

**Komparatif Proses Perencanaan  
Pembangunan Perdesaan Indonesia dan  
Malaysia**

**Tabel 2**  
**Komparatif Proses Perencanaan Pembangunan Perdesaan**

| KARAKTERISTIK<br>PROSES<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>PERDESAAN | INDONESIA  | MALAYSIA  | ANALISIS   |
|--|--|---|--|
| 1. konsep perencanaan pembangunan perdesaan                        | Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan berkelanjutan  | Transformasi perkotaan  | <p>Persamaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam penataan kawasan perdesaannya, kedua negara saling memperhatikan ketetapan penggunaan lahan dan fungsi kawasan</li> <li>- Penataan kedua negara saling menghentikan kebutuhan ruang untuk aktifitas publik</li> </ul> <p>Perbedaan:</p> <p>Malaysia lebih berfokus pada pertumbuhan kemampuan masyarakat desa, sedangkan indonesia lebih berfokus pada pengembangan kawasan perdesaan untuk terus berkelanjutan</p> |
| 2. tujuan perencanaan desa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif</li> <li>- Meningkatkan keterkaitan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan</li> <li>- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan</li> <li>- Menghasilkan keterpaduan antar bidang sektor dan kelembagaan dalam kerangka</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alam sekitar mampan ( environmental sustainable)</li> <li>- Ekonomi mampan ( economical sustainable)</li> <li>- Sosial mampan (social mampan)</li> <li>- Teknologi mampan (tecnology mampan)</li> </ul>  | <p>Persamaan:</p> <p>Tujuan perencanaan desa secara spesifik mengarah kepada kesejahteraan masyarakat</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Malaysia lebih tertuju pada pertumbuhan desa ke arah yang lebih maju dengan mempertimbangkan pengelolaan alami, ekonomi, dan teknologi yang berkelanjutan</p> <p>Indonesia lebih tertuju pada peningkatan dan keterpaduan lembaga maupun masyarakat untuk ikut ambil alih dalam perencanaan desanya</p>   |
| 3. prinsip perencanaan desa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Strategi</li> <li>- Demokratis dan partisipatif</li> <li>- Politis</li> <li>- Bottom-up palnning</li> <li>- Top-down palnning</li> </ul>  | <p>Alih dan ihsan; amanah dan beribawa; perpaduan; menghormati ilmu dan mengingati pencipta; menghormati kesendirian dan pembagian ruang; keamanan dan keselamatan; menghindari dari menyakiti oranglain dan menghormati hak oranglain; kerjasama; prihatin dan hormat menghormati; perundingan; kebersihan dan</p> | <p>Persamaan:</p> <p>Mempunyai dasar prinsip yang diutamakan dalam perencanaan desa</p> <p>Perbedaan:</p> <p>Prinsip malaysia dalam melakukan perencanaan desa lebih berfokus dalam 3 hal yaitu: pencipta, (Allah SWT, Manusia, dan Alam)</p>  |

| KARAKTERISTIK PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN                                      | INDONESIA   | MALAYSIA   | ANALISIS  |
|---|---|--|---|
|   |   | keindahan; pemeliharaan alam sekitar dan perancangan sumberdaya asli yang berterusan; dan tak membazir, penggunaan sumber yang cekap   |   |
| 4. ciri-ciri perencanaan desa   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aspiratif</li> <li>- Menarik</li> <li>- Operasional</li> <li>- Inovatif</li> <li>- Adaptif</li> <li>- Koordinatif</li> <li>- Demokratis</li> <li>- Edukatif</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bersifat menyeluruh</li> <li>- Manusia sebagai fokus pembangunan</li> <li>- Aktifitas berbagai dimensi</li> <li>- Perubahan kuantitatif dan kualitatif</li> <li>- Penggunaan dan distribusi sumberdaya dengan adil</li> </ul> | <p>Persamaan:<br/>Memiliki corak dan karakteristik partisipatif dalam perencanaan desa</p> <p>Perbedaan:<br/>Malaysia lebih mencirikan perencanaan desa yang bersifat secara keseluruhan, yakni perencanaan yang lebih diutamakan terlebih dahulu ialah perencanaan kepada Allah SWT, kedua perencanaan kepada manusia, dan yang terakhir perencanaan kepada alam dengan menunjang tinggi sikap partisipatif masyarakat desa</p>  |
| 5. ruang lingkup perencanaan desa   | <p>Rencana pembangunan jangka menengah desa</p> <p>Rencana kegiatan pemerintah desa</p> <p>Anggaran pendapatan dan belanja desa</p>   | Rencana aksi pembangunan desa  | <p>Persamaan:<br/>Menjelaskan dan merencanakan program-program atau tahapan dalam pembangunan yang ada di desa</p> <p>Perbedaan:<br/>Dalam hal ini malaysia hanya membuat satu dokumen perencanaan desa yaitu rencana aksi pembangunan desa. Dalam dokumen tersebut telah tergambar apa-apa saja yang menjadi tahapan program pembangunan desa. Sehingga dalam implementasinya dapat berjalan sesuai rencana</p> <p>Indonesia memiliki banyak dokumen dalam perencanaan desa, tetapi dalam pelaksanaan/implementasinya masih kurang</p> |
| 6. landasan hukum perencanaan pembangunan perdesaan   | Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa  | Undang-undang malaysia, akta 172 tentang akta perancangan bandar dan desa 1976   | <p>Persamaan:<br/>Undang-undang sebagai dasar untuk membangun dan mengembangkan desa, menjelaskan pengertian desa, dan tata cara pelaksanaan program di desa</p> <p>Perbedaan:<br/>Kebijakan di malaysia dikeluarkan oleh satu kementerian yaitu KKLW, di Indonesia kebijakan yang dikeluarkan oleh tiap perangkat pemerintahan saling tumpang tindih dan bertolak belakang</p>   |
| 7. peran serta aktif stakeholder pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan perdesaan | Pemerintah desa, BPD, pengurus RT/RW, paguyuban/kelompok swadaya masyarakat, kelompok peremouan, tim teknis, pemerintah daerah (kabupaten/kota), DPRD, forum perkotaan,   | <p>Pihak berkuasa perancang tempatan</p> <p>Jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung persekutuan (JKKK/P)</p>  | <p>Persamaan:<br/>Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari pemerintah</p> <p>Perbedaan:<br/>Tiap lembaga desa malaysia telah memiliki tugas yang berbeda dan telah ditetapkan oleh kementerian</p>  |

| KARAKTERISTIK<br>PROSES<br>PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN<br>PERDESAAN          | INDONESIA  | MALAYSIA                                | ANALISIS  |
|---|--|---|---|
| 8. sistem kelembagaan yang mengatur dalam perencanaan pembangunan perdesaan | LPMD, atau lembaga potensi lainnya<br><br>(13 Kementrian) Kemendagri, Kementrian Kesehatan, Kementrian PU, Kementrian Pendidikan, BPN, kemenakertrans, Kementrian pertanian, Kementrian sosial, KPDT, Kementrian ESDM, Kemenkominfo, Kementrian KUKM, dan kemendag | Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) | luar bandar dan wilayah, sedangkan di Indonesia lembaga yang dibentuk sendiri oleh masing-masing desa dan tugasnya dapat saling tumpang tindih<br>Persamaan:<br>Menentukan program yang akan dilaksanakan di desa<br><br>Perbedaan:<br>Di Malaysia KKLW bekerjasama dengan JKKK untuk mengawasi terlaksananya program dan memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan desa, di Indonesia program ditetapkan oleh tiap kementrian yang berbeda sesuai ruang lingkupnya, serta tidak menentukan lembaga pengawas yang formal bertanggung jawab atas terlaksananya program |

Sumber : Hasil Analisa, 2015

**Tabel 3**  
**Matriks Tahapan Penyusunan RPJM Desa**

| No | Tahapan/Kegiatan  | Hasil/Keluaran  | Keterangan   |
|----|---|---|--|
| 1  | Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa  | Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7- 11 orang   | Dibentuk oleh kelapala desa dengan, SK Kepala Desa |
| 2  | Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota                             | Data dan analisis :<br>Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota;<br>Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;<br>Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan Rencana pembangunan kawasan perdesaan   | Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa.             |
| 3  | Pengkajian Keadaan Desa   | Penyelarasan data Desa (data sekunder) Penggalian gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa   | Tim Penyusun RPJM Desa.                            |
| 4  | Analisa Data dan Pelaporan  | data Desa yang sudah diselaraskan; data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa; data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/ atau kelompok masyarakat.   | Tim Penyusun RPJM Desa                             |
| 5  | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa                         | Berita acara Penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri; laporan hasil pengkajian keadaan Desa; rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa | BPD<br>Tim Penyusun RPJM Desa Masyarakat Desa      |
| 6  | Penyusunan Rancangan RPJM Desa  | Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa  | Tim Penyusun RPJM Desa.                            |
| 7  | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa Untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa.   | BPD<br>Tim Penyusun RPJM Desa Masyarakat Desa      |
| 8  | Penetapan dan perubahan RPJM Desa   | Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa   | Kades<br>BPD                                       |

Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015



Gambar 1 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

Sumber : Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa, 2015

**Komparatif Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Indonesia dan Proses**

**Penyusunan Pelan Tindakan Desa (PTD) Malaysia**

**Tabel**  
**Matriks Komparatif Tahapan Penyusunan RPJM Desa dan PTD**

| No | Tahapan Penyusunan RPJM Desa (Indonesia)  | Tahapan Penyusunan PTD (Malaysia)                  | Analisa   |
|----|---|--|---|
| 1  | Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa  | Sistem Bestari dan Kenal Pasti Masalah dan Potensi | 1. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyesuaian arah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota, dan pengkajian keadaan Desa pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sama dengan sistem bestari pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia<br>2. Tim Penyusun RPJM Desa beranggotakan 7-11 orang, sedangkan Tim Penyusun PTD beranggotakan tidak melebihi 20 orang<br>3. Tahapan penyesuaian arah kebijaksanaan pembangunan Kabupaten/Kota pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sama dengan tahapan sistem bestari pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia yaitu penyesuaian dengan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang |
| 2  | Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota                             |  |   |
| 3  | Pengkajian Keadaan Desa   |  |   |
| 4  | Analisa Data dan Pelaporan  | Rekomendasi Pembangunan                            | Tahapan analisa dan data pelaporan pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sudah termasuk didalam tahapan Rekomendasi Pembangunan pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia.   |
| 5  | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa                         | Visi dan Tujuan Pembangunan                        | Tahapan penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa pada tahapan penyusunan RPJM Desa di Indonesia sama dengan tahapan visi dan tujuan pembangunan pada tahapan penyusunan PTD di Malaysia. Karena pada tahapan kedua negara ini, masing-masing melakukan perumusan terhadap kajian data Desa yang sudah dilakukan dan tujuan objektif pembangunan Desa yang akan dicapai.  |
| 6  | Penyusunan Rancangan RPJM Desa  | Rekomendasi Pembangunan                            | Tahapan penyusunan rancangan RPJM Desa di Indonesia pada hal ini berupa pemeriksaan dan persetujuan dari Kepala Desa. Sedangkan di Malaysia, pada tahapan ini masih pada perumusan permasalahan jangka pendek maupun jangka panjang dan juga peningkatan potensi desa yang ada.   |
| 7  | Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa | Manajemen Pembangunan                              | Tahapan ini di Indonesia, melakukan pembahasan rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan sebagai RPJM Desa. Sedangkan di Malaysia, melakukan pembahasan menentukan sistem manajemen dan organisasi yang terkait dalam pelaksanaan PTD. Mekanisme selanjutnya strategi pelaksanaan dan pembagian tugas dalam PTD ini diputuskan oleh rapat JKJK.  |
| 8  | Penetapan dan perubahan RPJM Desa   | Pembangunan dan Pemantauan                         | Tahapan di Indonesia berupa penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan perubahan RPJM Desa. RPJM Desa dapat diubah dengan ketentuan terjadi peristiwa khusus dan perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah. Sedangkan di Malaysia, tahapan ini dijelaskan lebih kepada hal-hal yang sudah bersifat teknis. Seperti program PTD harus dilaksanakan sesuai jadwal dan proses pelaporan kepada JKJK tentang kemajuan maupun kendala dalam pelaksanaan PTD.  |

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

Tahapan Perencanaan Pembangunan Perdesaan di Indonesia dan Malaysia pada dasarnya tidak jauh berbeda, kedua negara masing-masing memiliki karakteristik dan ciri tersendiri dalam perumusan perencanaan pembangunan perdesaan di negaranya.

Penyusunan RPJM Desa di Indonesia, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi : 1) Pembentukan tim penyusun RPJM Desa; 2) Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; 3) Pengkajian keadaan Desa; 4) Analisa data dan pelaporan; 5) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 6) Penyusunan rancangan RPJM Desa; 7) Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan 8) Penetapan dan perubahan RPJM Desa.

Penyusunan Pelan Tindakan Desa, dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 1) Sistem bestari; 2) Kenal pasti masalah dan potensi; 3) Visi dan tujuan pembangunan; 4) Rekomendasi pembangunan; 5) Manajemen pembangunan; 6) Pembangunan dan pemantauan

Sesuai dengan perkembangan ilmu yang selalu harus digali dan dirumuskan lagi, begitu pula dengan tahapan perencanaan pembangunan perdesaan di Indonesia ini, setelah diketahui fakta di lapangan, dikaji, dianalisis, maka dalam prosesnya masih harus disempurnakan lagi. Hal ini penting bagi pemerintahan perdesaan di Indonesia untuk perencanaan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan

### **Rekomendasi**

Mencapai perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia, terdapat beberapa rekomendasi pada tahapan proses perencanaan pembangunan perdesaan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi koreksi

bersama (Pemerintah, Masyarakat, Swasta, dan lain-lain) kedepannya dalam mencapai tujuan perdesaan Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan.

Studi ini diharapkan mampu menjadi alternatif masukan bagi tahapan perencanaan pembangunan perdesaan yang sedang berlangsung di Indonesia dan masa yang akan datang, untuk itu dibawah ini disebutkan beberapa elemen yang dapat menggunakan hasil studi ini, yaitu : 1) Kementerian Perdesaan; 2) Kementerian Badan Perencanaan Nasional; 3) Kementerian Dalam Negeri; 4) Pemerintah Provinsi/Kabupaten; 5) Pemerintah Desa; 6) Program studi Perencanaan Wilayah dan Kota yang diharapkan mampu meneruskan studi ini dan sebagai sebuah pendekatan alternatif disamping pengetahuan tentang tahapan perencanaan pembangunan perdesaan yang sudah ada sebelumnya

Dikarenakan penulisan ini hanya sebuah pengetahuan awal, maka perlu adanya studi yang lebih dalam mengenai kriteria apa saja yang akan diterapkan dalam tahapan ini dan penentuan sistem penilaian dalam prakteknya. Studi dan penelitian yang mendalam dalam hal ini sangat dibutuhkan demi terciptanya perencanaan pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu butuh studi lanjutan mengenai.

Pendalaman tentang tahapan yang dalam Perencanaan Pembangunan Perdesaan Alat ukur yang digunakan untuk menghitung keberhasilan kinerja dari perencanaan pembangunan perdesaan Verifikasi mengenai rencana tata ruang desa dapat dilakukan atau diterapkan dalam sistem perencanaan.

## Daftar Isi

- Arsyad, Lincoln. 1994. *Analisis Potensi Ekonomi Daerah, Program Pemesan*, Yogyakarta: BPF.
- Awang, S.A., 1999. "Pengembangan Hutan Rakyat di Jawa Tengah : Harapan dan Tantangan." Dalam *Jurnal Hutan Rakyat*. Vol. 1 No. 1 November 1999. Penerbit Pusat Kajian Hutan Rakyat Jurusan Manajemen Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta
- Bappenas. 2014. *Arah Kebijakan Pembangunan Perdesaan Untuk Pembangunan Perdesaan Mandiri Dan Berkelanjutan*. Disampaikan pada Workshop Penjarangan Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan di Jakarta, Hotel Grand Kemang, Kamis, 3 Juli 2014.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Chadwick, Bruce A, 1991, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (terjemahan), Sulistia ML., Semarang: IKIP Press
- Conyers, Diana. 1991. Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Daryanto, A dan N. Nuryartono. 2007. Penguatan Ketahanan Masyarakat Desa (*Community Resilience*) dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Desa. Paper dipresentasikan pada Seminar Desa Mandiri Menuju 2030. Mei 2007. Bogor.
- Dermawan, Rizky. 2004. *Pengambilan Keputusan, Landasan Filosofis, Konsep, dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Esman, J, Milton and Norman I Uphoff. 1984. *Local Organizations*. Ithaca And London: Cornell University Press
- Esterberg, Kristin G. 2002. *Qualitative Methods in Social Research*. New York: McGraw Hill.
- Habermas, Jurgen. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a category of Bourgeois Society*. Cambridge: Polity.
- Harahap, Sofyan Safri. 1999. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. Jakarta : Quantum.
- Hasan, Zubair. 2006. "Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy Concerns". *J.KAU: Islamic Econ., Vol 19*
- Hennink, M., Inge H. & Ajay B. 2011. *Qualitative Research Methods*. London: Sage.
- Heron, John. 1999. *The Complete Facilitator's Handbook*. London: Kogan Page.
- Hobley, M., 1996. *Participatory Forestry : The Process of Change in India and Nepal*. Rural Development Forestry Study Guide 3. London
- Ibrahim, N. 2003. *Pelan Tindakan Desa. Skudai*: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.
- INFRA: Kalendar Aktiviti Latihan Tahunan 2002. Institut Kemajuan Desa (INFRA), Malaysia: Kementerian Pembangunan Luar Bandar
- Interaksara Mahardika Timur, 2001. *Pendidikan Politik, Pemberdayaan Desa*, Pedoman Politisi, Jogjakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Kementerian Pekerjaan Umum. 2007. *Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan*.

- Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan.
- Li, Tania Murray. 2000. *Locating indigenous environmental knowledge in Indonesia. In Indigenous Environmental Knowledge and Its Transformations : Critical Anthropological Perspectives*. Edited by R. Ellen, P. Parkes, and E. Bicker Amsterdam : Harwood Academic Publishers, pp. 1212-149.
- Maarif, M. S. 2003. *Teknik-Teknik Kuantitatif untuk Manajemen*. Jakarta: Grasindo
- Malaysia, Akta 172 tentang Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976.
- Malaysia. 2010. Government Transformation Program: The Roadmap, Putrajaya: Jabatan Perdana Menteri.
- Malaysia (2010b) Economic Transformation Programme: A Road Map for Malaysia, Putrajaya: PEMANDU, Jabatan Perdana Menteri.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. New York: SAGE Publications.
- Ministry Of Rural And Regional Development Malaysia. 2014. Overview Of Rural Development In Malaysia : Towards Sustainable And Resilience Rural Society. Disampaikan pada : Seminar RRPg Ke-5 di INFRA Malaysia, Agustus 2014.
- Mohammad, Tahir Sabit Haji. 2010. "Principles of Sustainable Development in Ibn Khaldun's Economic Thought". *Malaysian Journal of Real Estate*, Vol 5, No.1.
- Muhi, Ali Hanapiah. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa. Jawa Barat: Institut Pemerintahan Dalam Negeri*
- Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Newman, William Lawrence, 1999. *Social Research Methods*, London: Needham Heights, Allyn and Bacon.
- Ngah, I. (2009), *Rural Development in Malaysia*, Chapter 2 in Ishak Yusof ed. *Malaysia's Economy, Past, Present and Future*: Kuala Lumpur: Malaysian Strategic Research Centre.
- Ngah, I., Preston, D. and Nor Azman Abdul Rahman (2010), *Current Planning Priorities In Rural Villages In Malaysia*, Learning From the New Malaysian Village Action Plan, ISDA Conference, Montpellier France, 28-31 June 2010
- Nugroho, Agus Eko. 2002. *Pola Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Press.
- Parker, I. 1994. *Discourse Analysis*. Dalam P. Banister, E. Burman, I. Parker, M. Taylor, dan C. Tindall (Eds), *Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide* (hlm. 92-107). Buckingham: Open University Press.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 18 tahun 2013 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 06 tahun 2014 Tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Sedarmayanti, 2004. Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju
- Sjafrizal. 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta: Baduose Media.
- Soebroto. 1988. Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang. Terjemahan. Jakarta: LP3ES.
- Soetrisno, Lukman. 1995. Upaya Menciptakan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Spradley, Jb. 1980. Participant Observation. New York: Holt, Rinehart and Winstons.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. 2003. Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan. Masyarakat, Jakarta: PT. Bina
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh: Read Press
- Sunario, dan Susanto, Astrid. 1997. Kebudayaan Jayawijaya dalam Pembangunan Bangsa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suzetta, P. 2007. Perencanaan Pembangunan Indonesia. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS. [www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id). (pdf) Di akses, 14 Desember 2013.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Haji Masagung.
- Tjokro Winoto, Moeljarto. 1987. Politik Pembangunan Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Tyson, Shaun dan Tony Jackson, 2011, Perilaku Organisasi, Yogyakarta: ANDI. Yin, Robert K. 2000, Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persad